

# JURNAL

## Techno-Socio Ekonomika

### Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi-Sosial dan Teknologi

Pengaruh Kepemimpinan dan Perencanaan Strategis terhadap Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata serta Implikasinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
Biller Panjaitan<sup>1</sup>, Sumeidi Kadarisman<sup>2</sup>, Sri Rochani Mulyani<sup>3</sup>

Pengaruh Penerapan *Health Care Delivery System* Sebagai Inovasi Jasa Pelayanan Kesehatan *Mass Customization* terhadap *Consumer's Satisfaction* serta Efisiensi Rumah Sakit Tipe B di Provinsi Jawa Barat.  
Abdul Gani Sidqi<sup>1</sup>, Saepudin<sup>2</sup>

Pengaruh Restrukturisasi Organisasi Divisi Corporate Development Strategy Terhadap Kinerja Perusahaan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk  
Siti Widharetno

Documentary Credit Sebagai Instrumen Perbankan yang Dapat Memeberikan keamanan Pembayaran Bagi Pihak Eksportir pada Perusahaan Internasional  
Finny Redjeki<sup>1</sup>; Sugihartanti<sup>2</sup>

Optimalisasi Perbandingan Algoritma *Brute Force* dan *Knuth-Morris-Pratt* Untuk Meningkatkan Kecepatan Pencarian Data Pada Aplikasi Mobile Tentang Hewan Vertebrata  
Beki Subaeki<sup>1</sup>, Asep Muhammad Indra Purnama<sup>2</sup>

Analisis Kinerja Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Harga Saham  
Tata Zenal Mutaqin

Rancangan Aplikasi Sistem Pakar Untuk Membantu Mengatasi Gangguan Perkembangan Pola Pikir Pada Anak  
Suhanda

Perangkat Ajar Pembelajaran Bermain Gitar Berbasis Multimedia  
Bayu Juliandani

Pemanfaatan Teknologi Location Base Service untuk Sistem Monitoring Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri  
Slamet Risnanto<sup>1</sup>, Hanhan Hanafiah Solihin<sup>2</sup>

Analisis Debit Air Sungai Untuk Kebutuhan Air Baku Pada Studi Kasus Sungai Citepus Di Wilayah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi  
Rosadi



JURNAL USB--YPKP	VOLUME 10	NO 3	HALAMAN 224 - 333	BANDUNG DESEMBER 2017	ISSN 1979-4835
---------------------	--------------	---------	----------------------	--------------------------	-------------------



# PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS TERHADAP IMPLEMENTASIKEBIJAKAN SEKTOR PARIWISATA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).

Biller Panjaitan<sup>1</sup>, Sumeidi Kadarisman<sup>2</sup>, Sri Rochani Mulyani<sup>3</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai Pengaruh Kepemimpinan dan Perencanaan Strategis terhadap Implementasi Kebijakan Pariwisata dan Implikasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat .

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ., dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Variabel yang diukur yakni variabel Kepemimpinan dan Perencanaan Strategis terhadap sebagai variabel bebas sedangkan variabel tidak bebas yaitu Implementasi Kebijakan Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah

Data dianalisis dengan teknik analisis data statistik Regresi Linier Berganda , koefisien determinasi (R Square) sebesar 0, 457 menunjukkan bahwa 45,70 % Implementasi Kebijakan Pariwisata di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bisa dijelaskan atau disebabkan oleh Kepemimpinan dan Perencanaan Strategis . Dengan kata lain Kepemimpinan dan Perencanaan Strategis memberikan pengaruh sebesar 45,70 % terhadap Implementasi Kebijakan Pariwisata. Sedangkan sisanya sebesar 54,30 % merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar Kepemimpinan dan Perencanaan Strategis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor Kepemimpinan dan Perencanaan Strategis berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Pariwisata. Pengaruh Kepemimpinan dan Perencanaan Strategis terhadap Implementasi Kebijakan Pariwisata yaitu positif yang berarti semakin tinggi Kepemimpinan dan Perencanaan Strategis semakin tinggi Implementasi Kebijakan Pariwisata pada taraf nyata  $p < 1\%$ .

Kata kunci : *Kepemimpinan , Perencanaan Strategis dan Implementasi Kebijakan Pariwisata*

## ABSTRACT

*The goal of this research is to describe the influence of leaderships and strategic planning towards tourism policy implementation at West Bandung Regency. Research method is Quantitative research and collect data by questioner, interview , observation and documentation.*

*The variables were leaderships and strategic planning as the independent variables, the dependent variable was tourism policy implementation. Data have been analyzed through Multiple Regression.*

*The result of this research showed that leaderships and strategic planning influence the tourism policy implementation. The influence of leaderships and strategic planning toward tourism policy implementation is positive it means that the more higher leaderships and strategic planning the more higher the tourism policy implementation and it has mean in real rank  $p < 0.01$ .*

*By this research, the hypothesis, which has been proposed, leaderships and strategic planning will influence tourism policy implementation. The result has showed that the mean of tourism policy implementation is 0.4570 or the grade variation of Tourism Policy Implementation*

*is 45,70 percent depending on leaderships and strategic planning variation.*

*Keywords : Leaderships, Strategic Planning , Tourism Policy Implementation*

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat indah. yang

memiliki potensi wisata yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai obyek wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan. Wisatawan yang datang berkunjung merupakan sumber devisa negara yang dapat meningkatkan

pendapatan negara dan masyarakat di lokasi obyek wisata. Indonesia sebagai salah satu negara yang terkenal kaya dan memiliki beribu obyek wisata alamnya yang tersebar di seluruh wilayah, mempunyai peluang besar untuk dapat menyedot para pelancong khususnya wisatawan dari mancanegara yang dapat menghasilkan devisa bagi negara. Betapa tidak, karena hampir di seluruh wilayah daerah tingkat II di tanah air memiliki obyek wisata tersendiri.

Perkembangan pariwisata di Indonesia saat ini didorong untuk menjadi salah satu sektor yang memberikan andil besar dalam pengembangan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut didorong oleh perkembangan dunia pariwisata Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, terlihat dari bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah tujuan wisata di Indonesia, yang terkenal dengan keindahan alam, keramahan penduduk, dan keanekaragaman budayanya. Pada tingkat daerah, sektor ini diperkirakan akan menjadi penunjang pendapatan daerah yang kontribusinya di masa mendatang memiliki prospek yang menguntungkan. Hal tersebut juga menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dimana sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu mendukung pendapatan asli daerah. Secara nasional, pariwisata diharapkan akan menjadi sektor utama penyumbang devisa terbesar.

Target pencapaian sector pariwisata sebagai sector yang memberikan kontribusi terbesar bagi devisa negara.

### 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, berbagai masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tingkat kompetensi kerja aparatur yang kurang memadai diduga menjadi salah satu penyebab rendahnya Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Sistem pengembangan karir aparatur yang belum jelas diduga sebagai salah satu penyebab rendahnya terhadap Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3. Kurangnya pengawasan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diduga menyebabkan rendahnya Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata di Kabupaten Bandung Barat.
4. Kepemimpinan yang belum efektif diduga menyebabkan rendahnya Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata di Kabupaten Bandung Barat.
5. Perencanaan strategis yang masih lemah diduga menyebabkan rendahnya terhadap Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata di Kabupaten Bandung Barat.
6. Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata belum efektif diduga menyebabkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Kabupaten Bandung Barat.
7. Kepemimpinan yang belum efektif diduga menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Kabupaten Bandung Barat.
8. Perencanaan strategis yang masih lemah diduga menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Kabupaten Bandung Barat.
9. Kepemimpinan yang belum efektif, Perencanaan strategis dan Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata belum efektif diduga menyebabkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Kabupaten Bandung Barat.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mempelajari pengaruh kepemimpinan terhadap Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata dan Implikasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Mempelajari pengaruh perencanaan strategis terhadap Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata dan Implikasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3. Mengetahui berapa besar pengaruh kepemimpinan dan perencanaan strategis secara bersama – sama terhadap Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata dan Implikasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
4. Mencari solusi yang ideal guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Teori

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat indah. yang memiliki potensi wisata yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai obyek wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan. Wisatawan yang datang berkunjung

merupakan sumber devisa negara yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat di lokasi obyek wisata.

Indonesia sebagai salah satu negara yang terkenal kaya dan memiliki beribu obyek wisata alamnya yang tersebar di seluruh wilayah, mempunyai peluang besar untuk dapat menyedot para pelancong khususnya wisatawan dari mancanegara yang dapat menghasilkan devisa bagi negara. Betapa tidak, karena hampir di seluruh wilayah daerah tingkat II di tanah air memiliki obyek wisata tersendiri.

Perkembangan pariwisata di Indonesia saat ini didorong untuk menjadi salah satu sektor yang memberikan andil besar dalam pengembangan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut didorong oleh perkembangan dunia pariwisata Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, terlihat dari bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah tujuan wisata di Indonesia, yang terkenal dengan keindahan alam, keramahan penduduk, dan keanekaragaman budayanya.

Provinsi Jawa Barat dengan keindahan alam pegunungan dan peninggalan budaya dan sejarah berupa candi-candi, benteng-benteng, dan masih banyak lagi yang tidak ada duanya. Berbagai karya seni budaya dan peninggalan nenek moyang di wilayah ini merupakan aset yang menarik untuk ditawarkan ke wisatawan. Oleh karena itu pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bandung Barat pun harus dipandang sebagai potensi ekonomi yang sangat penting untuk menopang pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat pada khususnya dan Jawa Barat pada umumnya.

## 2.2 Konsep dan Pengertian Kepemimpinan

### 2.2.1. Pengertian Kepemimpinan

Tidak mudah memberikan definisi kepemimpinan yang sifatnya universal dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam kehidupan organisasi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jenis-jenis definisi tersebut sama jumlahnya dengan pembuatnya.

A.Dale Timpe (2000 : 277) mendefinisikan, "kepemimpinan adalah sebagai kemampuan untuk memadukan sekelompok individu menjadi tim atau unit yang produktif untuk mencapai tujuan". Pengertian ini lebih mengarahkan kepada bagaimana individu-individu bisa bekerja sama menjadi sebuah tim yang produktif dalam kinerjanya yang diarahkan untuk mencapai tujuan.

Sedangkan Mulyasa (2009:107-108) mendefinisikan kepemimpinan sebagai "kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasihati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum (kalau perlu), serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara efektif dan Efisien". Dari definisi tersebut membuktikan bahwa menjadi seorang pemimpin tidak sembarangan, akan tetapi harus seseorang yang memiliki kemampuan dan kemauan yang luar biasa.

Dalam hal kepemimpinan Richard L. Hughes (2012:5) mengatakan, "*Leadership as " the process of influencing an organized group toward accomplishing its goals" is fairly comprehensive and helpful*". Dinyatakan bahwa kepemimpinan sebagai proses

mempengaruhi suatu kelompok yang terorganisir menuju mencapai tujuan yang cukup komprehensif dan bermanfaat.

### 2.2.2. Dimensi Kepemimpinan

Dari berbagai pendapat tentang pemahaman kepemimpinan yang dijadikan dimensi dan

selanjutnya dijadikan dasar dalam penelitian kemudian disusun indikator, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Kepemimpinan dalam penelitian ini dalam organisasi yaitu pemerintah kabupaten Bandung barat yang terkait dengan sektor pariwisata, maka disusun dimensi-dimensi dari berbagai pendapat seperti Dale Timpe memandang kepemimpinan dari integritas, kecerdasan, keberanian, inisiatif dan penilaian. Mulyasa menyatakan bahwa kepemimpinan memiliki peran sebagai *educator, manager, administrator, supervisor, leader* dan *innovator*.

Dengan demikian fokus penelitian ini didasarkan pada variabel kepemimpinan sebagai variabel eksogen disesuaikan dengan kondisi tempat penelitian menggunakan dimensi *educator, manager, administrator, supervisor, leader, dan innovator*.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dapat diartikan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi para anggotanya agar mereka mampu bekerja sama, sehingga membentuk jalinan kerja yang harmonis dengan pertimbangan aspek efisien dan efektif untuk mencapai tingkat prestasi kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh organisasi tertentu.

### **23 Konsep dan Pengertian Pendapatan Asli Daerah ( PAD)**

Sistem pemerintahan desentralisasi yang dianut di Indonesia mulai tahun 2001 menyebabkan perubahan yang cukup besar, dimana sistem pemerintahan desentralisasi tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada dimana sistem pemerintahan sebelumnya belum mampu mengatasi percepatan pembangunan.

Pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, karena mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang ada, serta dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat bukan hanya dalam pembiayaan tetapi juga terkait dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah atau desentralisasi fiskal. Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Kementerian Dalam Negeri, 2013). Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pengertian pendapatan asli daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan.

### **24 . Hubungan sector Pariwisata dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Jurnal Ilmiah Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) mengindikasikan bahwa kegiatan kepariwisataan mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang dapat diandalkan dan tetap bertahan, sehingga kebijaksanaan pembangunan dapat lebih diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan. Rantetadung (2012) Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik (Spillane, 1987:14). Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong

pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki rahasia kekayaan akan tempat wisata maupun aktivitas, dalam mendorong pembangunan ekonominya mencoba untuk lebih berusaha mengembangkan potensi kewilayahan yang dimiliki.

## 25 Kerangka Pemikiran

Perkembangan pariwisata di Indonesia saat ini didorong untuk menjadi salah satu sektor yang memberikan andil besar dalam pengembangan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut didorong oleh perkembangan dunia pariwisata Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, terlihat dari bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah tujuan wisata di Indonesia, yang terkenal dengan keindahan alam, keramahan penduduk, dan keanekaragaman budayanya. Pada tingkat daerah, sektor ini diperkirakan akan menjadi penunjang pendapatan daerah yang kontribusinya di masa mendatang memiliki prospek yang menguntungkan. Hal tersebut juga menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dimana sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu mendukung pendapatan asli daerah. Secara nasional, pariwisata diharapkan akan menjadi sektor utama penyumbang devisa terbesar.

Untuk mengukur kepemimpinan perlu adanya dimensi yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin.

Dalam penelitian ini kepemimpinan dilihat dari segi fungsi mengacu pada pendapat A.Dale Timpe (2000); Mulyasa (2009); Husaini Usman (2009); Richard L. Hughes (2012) sesuai kebutuhan penelitian disimpulkan dari beberapa pendapat di atas bahwa kepemimpinan difokuskan pada fungsi sebagai *educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator*.

## METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Metode Penelitian

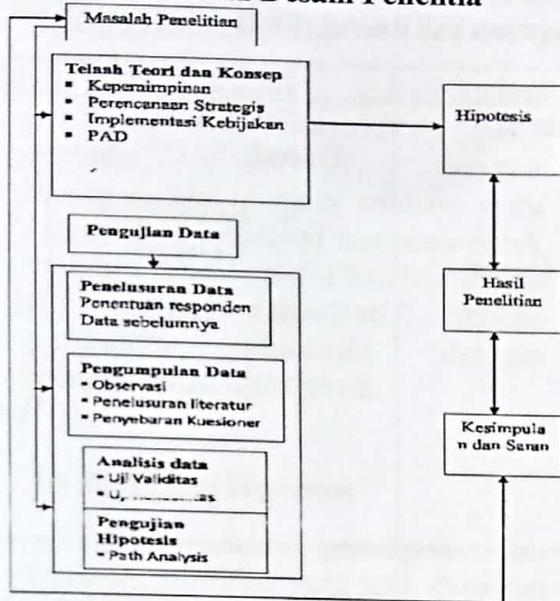
Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif dan verivikatif (verifikatife and descriptive research)*. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran (deskripsi) dari variabel-variabel yang diteliti. Penelitian verifikatif adalah untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai yang berada pada Pemerintah kabupaten Bandung Barat, masyarakat penduduk setempat dan Para wisatawan.

### 3.2 Desain Penelitian

Untuk memberikan gambaran penyusunan konsep rancangan penelitian disusun desain penelitian, yaitu memuat rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.

Adapun desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

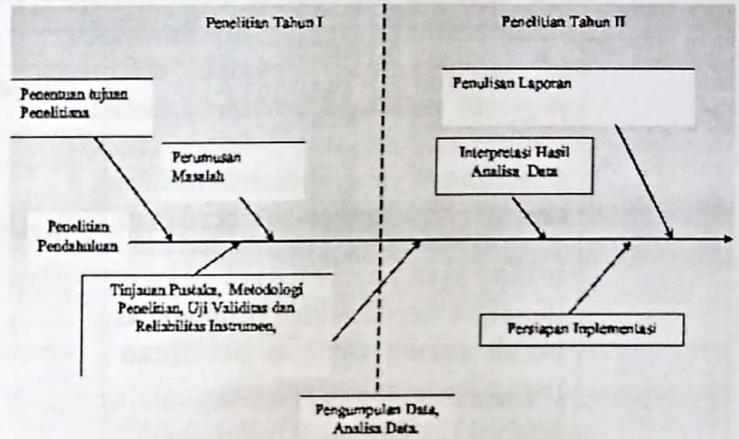
**Gambar 4.1 Desain Penelitian**



### 3.3 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Untuk memperjelas dalam pengumpulan data dan pengujian hipotesis perlu dikemukakan batasan-batasan konsep variabel, dimensi (subvariabel) dan indikator-indikatornya. Dalam penelitian ini menggunakan *first order*, yaitu pengukuran variabel laten dan manifest. Hal ini untuk memudahkan jenis data (primer dan/ atau sekunder), sifat data (kualitatif dan/atau kuantitatif) dan skala ukurannya (nominal, likert, ordinal, rasio). Dalam

**Gambar Diagram Alir Penelitian**



penelitian ini jenis data primer berupa tanggapan responden melalui kuesioner, sedangkan data sekunder data yang diperlukan berupa dokumen dari sekolah tempat penelitian. Sifat data kuantitatif yaitu persepsi tanggapan responden melalui kuesioner yang menggunakan skala likert. Dengan skala likert, maka variabel (Variabel laten) yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel (variabel manifest). Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

**Tabel 4.1  
Skor Skala Likert**

No	Tanggapan	Skor
1.	Sangat setuju/selalu/sangat positif/semuanya/ Sangat baik	5
2.	Setuju/Sering/positif/sebagian besar/ Baik	4
3.	Ragu-ragu/Cukup/kadang-kadang/netral	3
4.	Tidak setuju/kurang/hampir tidak pernah/negative	2
5.	Sangat tidak setuju/tidak nyaman/ sangat kurang/tidak melibatkan/sangat negatif	1

Sumber: Diadopsi dari Sugiyono (2010:94 dan 99)

Operasional variabel penelitian disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Operasional Variabel Pendapatan asli daerah(PAD)**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pendapatan asli daerah(PAD) ( $\xi_4$ )  penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang (2002:132)Veithzal Rivai ( 2005); Halim ( 20014:96)	Pajak Daerah          Retribusi Daerah (X2)	a. Pendapatan Daerah    b. Retribusi Daerah	Rasio

**3.4 Sumber Data dan Cara Penentuan Data/Informasi**

**3.4.1 Sumber Data.**

Objek dan populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Pemerintah kabupaten Bandung Barat. , masyarakat setempat dan pengunjung atau wisatawan, data sekunder diperoleh dari dokumen yang ada di Kantor, sedangkan data primer diperoleh langsung dari pegawai Pemerintah kabupaten Bandung Barat, masyarakat setempat dan pengunjung atau wisatawan. melalui kuesioner. Penelitian

**3.4.2 Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai Pemerintah kabupaten Bandung Barat. Adapun pertimbangan yang mendasari pemilihan obyek penelitian dalam populasi dan sampel, berpegang pada alasan sebagai berikut:

- (1) Dalam kontek keberhasilan pembangunan nasional , peran pemerintah daerah sangat menentukan.
- (2) Pegawai memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan Pemerintah

kabupaten Bandung barat , berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata di kabupaten Bandung barat .

- (3) Pegawai bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas yang diberikan pimpinan melalui tindakan yang dapat mencerminkan perilaku dalam upaya mencapai tujuan dan peningkatan kinerja.
- (4) Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).Pemerintah kabupaten Bandung barat diduga dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel termasuk kepemimpinan, perencanaan strategis, dan Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata

**3.5. Metode Analisis Data**

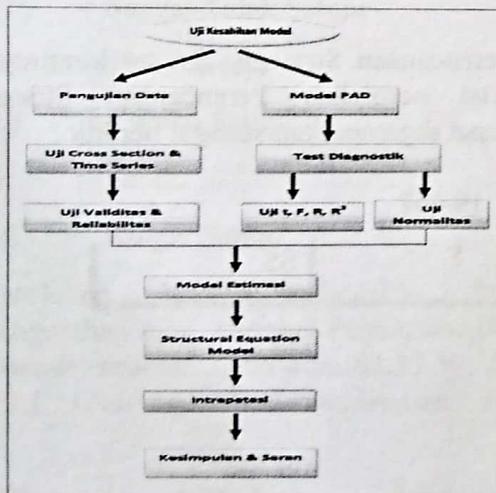
Pengolahan data yang terkumpul dari hasil penyebaran kuesioner dan pengumpulan data sekunder dilakukan dalam 4 tahap yaitu editing, entry, tabulasi dan analisis data. Mengingat model dalam penelitian ini adalah model kausalitas (hubungan/pengaruh sebab akibat), maka untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan alat uji Model

Persamaan Struktural (*Structural Equation Model-SEM*).

Dalam pelaksanaan penelitian ini didasarkan pada metode survei dengan menggunakan 2 jenis analisis yaitu (1) analisis deskriptif terutama untuk variabel yang bersifat kualitatif dan (2) analisis kuantitatif, berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik.

### 3.6 Pengujian Hipotesis

Berdasarkan paradigma dan hipotesis penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dalam penelitian ini terdapat tiga variabel eksogen, yaitu: Kemimpinan (PP), Perencanaan strategis (PS) dan Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata (IKSP), dan satu variabel endogen, yaitu: Pendapatan

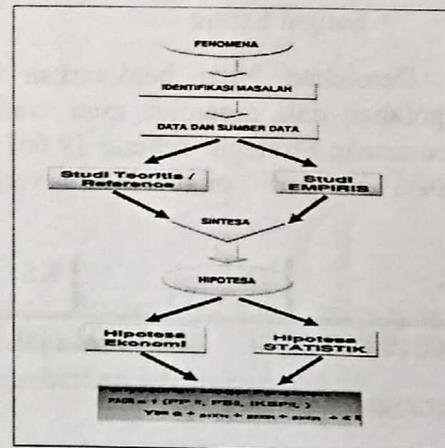


Asli Daerah (PAD). Selanjutnya masing-masing variabel tersebut akan dilakukan pengujian hipotesis secara empiris dengan menggunakan alat analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui penggunaar software Lisrel Version 8.5.

### 3.7.1. Rancangan Uji Hipotesis

Uji – uji parameter dapat dideskripsikan sbb :

1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Bersamaan) dengan uji F
2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Individual) dengan Uji t
3. Uji tahap satu (*Fist Order Test*) dan Uji Tahap Kedua (*Second Order Test*)



Gambar 3.5 : Sistematika Penelitian & Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

### HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Kantor Kabupaten Bandung Barat sebagai unit observasi .subjek analisis adalah karyawan pemda Kantor Kabupaten Bandung Barat (KBB) .dengan objek penelitiannya adalah persepsi (tanggapan ) karyawan KBB tentang Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Implementasi Kebijakan, Pendapatan Asli Daerah . Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan

kuesioner ke 300 responden yang berstatus karyawan KBB.

### 4.1. Uji Reliabilitas Variabel Pendapatan Asli Daerah

Pada tabel 4.13 diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,815. Menurut Sekaran (2013: 293) alat ukur dapat dikatakan reliabel jika mempunyai nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Karena variabel Pendapatan

Asli Daerah mempunyai nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6 maka data pada

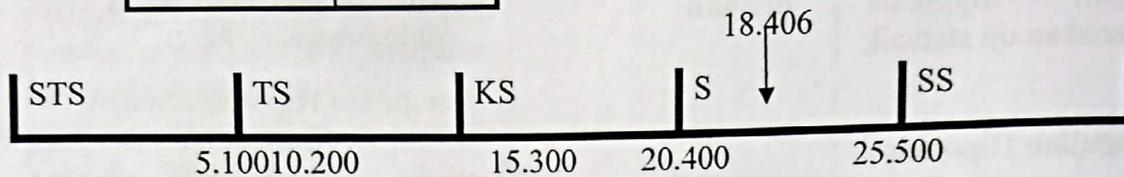
**Tabel 4. 1 Nilai *Cronbach's Alpha* Pendapatan Asli Daerah Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,815	3

variabel tersebut dinyatakan reliabel

Sumber : Kuesioner. Data diolah pakai SPSS.22

Perolehan Nilai berdasarkan hasil pengolahan Nilai ideal variabel Kepemimpinan sebesar 18.406 atau 72,18 % secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

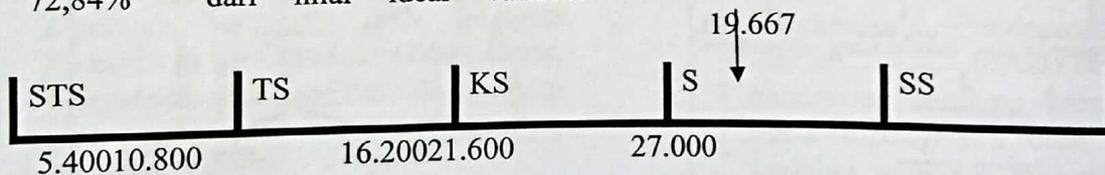
KS = Kurang Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

Perolehan Nilai berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai variabel Perencanaan Strategis sebesar 19.667 atau 72,84% dari nilai ideal variabel

Perencanaan Strategis. Secara kontinum , nilai perolehan Perencanaan Strategis dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

Perbaikan atas pernyataan-pernyataan P34, P 26 dan P33 dapat dilakukan dengan cara melaksanakan analisa SWOT sebagai berikut :

1. Setiap seksi/ sub bidang/ sub bagian membentuk satuan tugas terdiri dari 5 sampai dengan 7 orang.

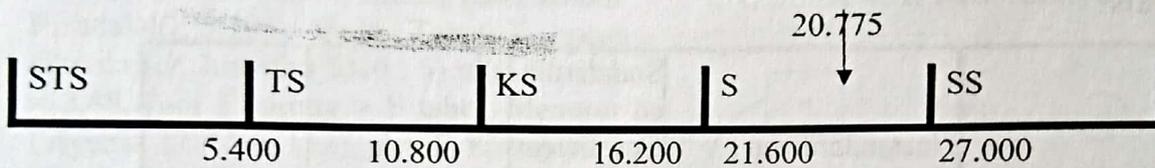
2. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berdiskusi . anggota gugus tugas diminta menjelaskan apa saja yang menjadi kekuatan, dan kelemahan unit kerja dimana responden bekerja . anggota gugus tugas diminta menjelaskan apa yang menjadi peluang dari luar unit kerja dan ancaman dari luar unit kerja.
3. Data kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dikumpulkan
4. Kemudian ditetapkan kelemahan apa saja yang segera dicarikan solusi
5. Melaksanakan solusi

6. Melakukan evaluasi atas solusi yang sudah dikerjakan

7. Melakukan perbaikan atas solusi

Dengan adanya tahapan ini tiap unit kerja akan dapat lebih mudah menemukan kelemahan yang ada di unit kerja dan unit kerja dapat dengan mudah juga mencarikan solusinya.

Perolehan Nilai berdasarkan hasil pengolahan data pada diperoleh nilai variabel Implementasi Kebijakan sebesar 20.775 atau 76,94 % dari nilai ideal variabel Implementasi Kebijakan. Secara kontinum , nilai perolehan Implementasi Kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

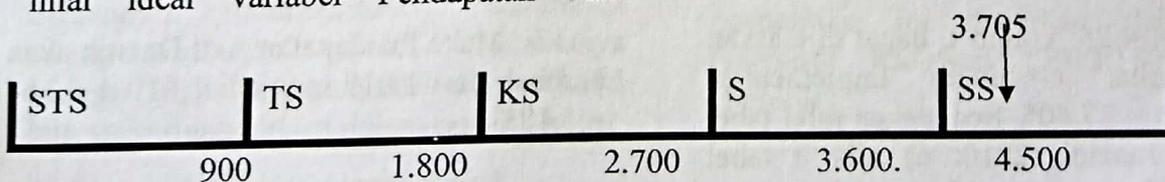
KS = Kurang Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

Perolehan Nilai berdasarkan hasil pengolahan nilai variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 3.705 atau 82,33 % dari nilai ideal variabel Pendapatan Asli

Daerah. Secara kontinum , nilai perolehan Pendapatan Asli Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 300 responden dengan jumlah pernyataan 3 buah, maka Nilai 3.705 terletak pada daerah Sangat Setuju. Nilai tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar responden berpendapat sangat setuju bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh KBB itu sudah sangat baik .

1. Implementasi Kebijakan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Kepemimpinan, Perencanaan Strategis Terhadap Implementasi Kebijakan
3. Kepemimpinan Terhadap Implementasi Kebijakan
4. Perencanaan Strategis Terhadap Implementasi Kebijakan

#### 4.5. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dilaksanakan untuk membuktikan bahwa ada pengaruh atau tidak pengaruh :

##### 4.5.1. Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4. 2. Uji t Implementasi Kebijakan Terhadap PAD

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,019	,305		3,339	,001
Implementasi Kebijakan	,164	,004	,908	37,405	,000

a. Dependent Variabel: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Kuesioner.Data diolah pakai SPSS 22

Pada tabel 4.25. kolom t, dapat dijelaskan bahwa nilai t hitung Implementasi Kebijakan = 37,405. Sedangkan nilai tabel menurut Junaidi (2010: 6) nilai t tabel (untuk 300 responden dikurangi 1 variabel = 299 dengan  $\alpha = 0,05$ ) adalah sebesar = 1,65. Jadi nilai t hitung > t tabel

berpengaruh terhadap variabel dependent yang hasilnya disajikan pada tabel 4.29. Uji F

Maka Pendapatan Asli Daerah akan berubah dari 1,019 menjadi  $1,019 + 0,164 = 1,183$

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat data Rpada tabel 4.26 di bawah ini :

**Tabel 4. 3. Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9722,632	2	4861,316	125,205	,000 <sup>b</sup>
	Residual	11531,618	297	38,827		
	Total	21254,250	299			

a. Dependent Variabel: Implementasi Kebijakan

b. Predictors: (Constant), Perencanaan Strategis, Kepemimpinan

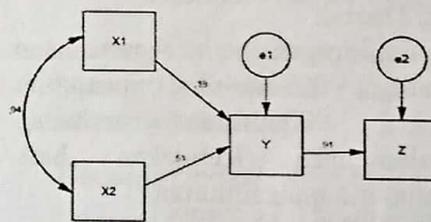
Sumber:Kuesioner. Data diolah pakai SPSS 22

Pada tabel 4.29 nilai F hitung pada kolom F adalah 125,205. Pada Tabel F yang dibuat oleh Junaidi (2010 : 5) nilai F tabel = 3,88. Jadi F hitung > F tabel. Menurut Priyatno (2012 : 122) jika F hitung > F Tabel , maka ada pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Memperhatikan pendapat Priyatno (2012: 122 ) dapat dikatakan bahwa Kepemimpinan, Perencanaan Strategis mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Implementasi Kebijakan.

Pada tabel 4.28 nilai R square = 0,457 . artinya bahwa nilai koefisien determinasi =  $0,457 \times 100 \% = 45,70 \%$ . Makna Koefisien Determinasi 45,70 % adalah Kepemimpinan, Perencanaan Strategis memberikan kontribusi mempengaruhi sebesar 45,70 % .sisanya sebesar 54,30 % dipengarhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

Pembahasan

**Gambar 4. 1. Path Analysis Penelitian**



Hasil keseluruhan penelitian ini dapat dirangkum dalam gambar analisis jalur (*path analysis* )yang disajikan dalam gambar 4.3.

Penjelasan tentang Koefisien Jalur, Pengaruh Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Implementasi Kebijakan dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) dari hasil penelitian ini disajikan dalam tabel menurut Riduwan (2013:150) sebagai berikut :

**Tabel 4. 4. Analisa Jalur**

Variabel	Koefisien Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung Melalui Variabel Lain	Total	Pengaruh Bersama
X1	0,18	0,18	0,91	0,1638	

X2	0,51	0,51	0,91	0,4641	
Y	0,91	0,91		0,91	
e1		0,176			
e2		0,543			
Y ke Z				0	0,91

Sumber : Kuesioner, Data diolah pakai SPSS 22

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini telah membuktikan bahwa :

1. Implementasi Kebijakan mempunyai pengaruh positif, signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Kepemimpinan , Perencanaan Strategis mempunyai pengaruh positif, signifikan terhadap Implementasi Kebijakan baik parsial maupun simultan

### Pendapatan Asli Daerah

Penelitian ini telah membuktikan bahwa nilai variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 3.703 dengan nilai rata-rata 4,52 (sangat setuju) . Nilai tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar responden berpendapat sangat setuju bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh KBB itu sudah sangat baik . karena sudah sangat baik, maka hanya diperlukan upaya memelihara persepsi responden tentang Pendapatan Asli Daerah

## DAFTAR PUSTAKA

Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Kementerian Dalam Negeri. 2013. *Dana Perimbangan, sumber Pendapatan Daerah Terbesar*.

<http://www.keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/> Diakses pada 6 Oktober 2013 Lynarsatia, Bramantio. 2000. *Analisis Perkembangan Industri Pariwisata dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta Tahun 1990–2000*.

Universitas Sebelas Maret. <http://www.uns.ac.id/digilib> Diakses pada 6 Oktober 2013 Magriasti, Lince. 2011. *Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah: Analisis Dengan Teori Sistem David Easton*.

Universitas Negeri Padang. <http://www.fisip-untirta.ac.id/eJLAN/> Diakses pada 6 Oktober 2013 Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AndiOffset. Spillane, James. 1987. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta:

Dale, Timpe, A, (2015), *Seri Ilmu dan Seni Manajemen Bisnis Kinerja*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Dye, Thomas R. 2014. *Understanding Public policy*, Fourth Edition, Prentice Hill Inc.Engelwood Cliffs

Ermina Miranti, 2006, *Prospek Pengembangan Pariwisata Sumatera Barat*, Jurnal Ekonomi.

Feri, 2007, *Problematika Pengembangan dan Peluang Pariwisata Sumatera Barat*, Kadin Sumbar.

Freddy Rangkuti, 2012, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia.

Fuad dan Ghozali (2005). *Structural Equation Modeling Teori Konsep & Aplikasi Dengan Program Lisrel 8.54*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP

Hoogewert, 2014, *Ilmu Pemerintahan*, Erlangga . Surabaya.

JKaques, Eliot, 2015, *a General Theory of Bureaucracy*, Halsted Press, New York. Masngudi, *Manajemen Strategik (Hand Out)*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Borobudur.

Mulyasa. E (2012). *Kurikulum Yang Disempurnakan Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Nizwan Zukhri, 2013, *Analisis SWOT Pengembangan Pariwisata*, Pangkal Pinang: Universitas Bangka Belitung.

Pierce II, John A., & Robinson, Richard B., 2014, *STRATEGIC MANAGEMENT: formulation, implementation, and controll*,

14<sup>th</sup> Ed., Mc Graw Hill, New York.

Rivai, Veitzhal (2014), *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Thompson, Arthur A., Jr & Strickland, 1996, *STRATEGIC MANAGEMENT*, 9<sup>TH</sup> Ed., Irwin, Chicago.

Sugiyono , 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

Syaukani, H. R. Gafan Affar, Rasyid Ryaas. 2012, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2004. Jakarta Yoeti, Oka. 2008. *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: Kompas.

Penulis :

**Billier Panjaitan<sup>1</sup>, Sumeidi Kadarisman<sup>2</sup>, Sri Rochani Mulyani<sup>3</sup>**  
**Dosen Tetap pada Fak. Ekonomi USB YPKP Bandung**